

Analisis peran ganda gubernur dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia studi kasus Jawa Barat tahun 2010-2014 = The role of governor in governance system of Indonesia

Agnes Wirdayanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477743&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan peran ganda gubernur dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari waktu ke waktu, menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran ganda gubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah di Jawa Barat dan menganalisis strategi penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antar daerah di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor- Faktor yang berpengaruh terhadap peran ganda gubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antara daerah dan daerah di Jawa Barat, antara lain : 1 Faktor politik, 2 Faktor Kepemimpinan, 3 Faktor Kelembagaan dan 4 Faktor sosial. Hasil Kajian menunjukkan strategi penyelarasan kepentingan pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yakni: a Gubernur sebagai struktur perantara dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; b Gubernur sebagai Budget Optimizer dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan; c Memperkuat organisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang didukung oleh instrumen koordinasi, pembinaan dan pengawasan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan peraturan perundang-undangan; d Alternatif peletakan wakil pemerintah. Rekomendasi penelitian yakni ; a Memperjelas kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di provinsi, melalui penguatan peraturan kebijakan baik pada level perundang-undangan maupun peraturan teknis terkait; b Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pelaksanaan peran dan fungsinya perlu didukung oleh sumber pendanaan yang kuat, sehingga gubernur dapat berperan sebagai budget optimizer dalam melaksanakan penyelarasan kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah. d Dana penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat hendaknya tidak seragam tetapi memperhatikan kebutuhan dari masing-masing daerah. e Memperkuat kelembagaan sekretariat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak tumpang tindih dengan tugas organisasi perangkat daerah yang ada.

<hr />

This research analyzes the role of governor in the governance system of Indonesia. This study focuses on factors that influence the governor's dual role and analyzes strategies in alignment between central and regional interests, and between regions in West Java. This research uses post-positivism paradigm by using qualitative method. The results showed that the factors that influence for the role of governor in alignment between central and regional interests, and between regions in West Java are political factors, leadership factors, institutional factors and social factors. The central and sub-national interest alignment strategy required is to maximize the governor's role as an intermediary structure between the central government and local government, strengthening the role of the governor organization as a representative of the central government in the region, the governor as a budget optimizer in regional-based development planning.

To maximize the governor's dual role, it is necessary to strengthen the position, role and function of the governor as the regional head and the representative of the central government in the province, through policy regulation at both the legislative and related technical regulations, and alternative governor as a representative government. Recommendations from this study include : a to clear the position, role and function of the provincial head and representative of central government in the province by strengthening the policy, both the law and related technical regulations; b to provide support for the governor as the central government representative, in term of strong financial source, to help the governor effectively assume the role of the budget optimizer that balances the needs between the central and regional as well as inter-regional; c for the central government to take into account the needs of each region in the mechanism of distributing the deconcentrated regional budget, instead of applying a single standard distribution; d to strengthen the provincial secretary institution as the representative of the central government to avoid overlap with other provincial apparatus in doing their job.